

PARTAI ISLAM DI NEGARA MAYORITAS MUSLIM: STUDI PEMILU PERTAMA INDONESIA

Jamilludin Ali, M.Hum¹

Abstract

The majority of Indonesian's populations are Moslems. The Islamic political elite saw the opportunity to take power by bringing the name of Islam to the political party. That are great opportunities because of the assumption that the majority of Moslems would vote for the Islamic party because Islamic party fighting for the benefit of Islam. However, history proves the Islamic party had never won in the general elections in Indonesia. Election of 1955 is regarded as the first democratic elections in Indonesia. It is fact. Although at that time the Moslems reach 90% of the total populations of Indonesia, the election results just put Islamic parties under nationalist party. The defeat of the Islamic party is caused by many things. Among these are the internal divisions in the Islamic party, is to promote party interests rather than Islam, and fierce resistance from nationalist and secular party.

Keywords: *party, elections, Islam*

Pendahuluan

Islam merupakan agama *samawi*² yang lahir di jazirah Arab. Namun demikian, ajaran Islam yang membawa konsep *rahmatan lil 'alamiin* (rahmat kepada seluruh alam semesta) membawa konsekuensi penyebaran ajaran Islam wajib disampaikan kepada seluruh umat manusia di manapun mereka berada, termasuk di Indonesia. Meskipun secara geografis Indonesia cukup jauh dari jazirah Arab tetapi semangat dan keyakinan pendakwah Islam berhasil menjadikan mayoritas penduduk negara kepulauan ini memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

¹ Penikmat Sejarah, bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

² Agama *samawi* adalah agama yang menerima wahyu dari langit. Selain Islam, agama *samawi* lainnya adalah agama Yahudi dan Nasrani. Dengan adanya istilah agama *samawi* muncul istilah agama *ardhy*, yaitu agama yang tidak menerima wahyu dari langit. Agama-agama *ardhy* cukup banyak, di antaranya adalah Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya.

Nabi Muhammad Saw. sebagai pembawa ajaran Islam menjadi *suri tauladan* (panutan) bagi seluruh muslim. Setiap muslim menjadikan Rasul sebagai panutan pada seluruh bagian kehidupannya. Tidak hanya dalam kehidupan agama saja tetapi juga dalam kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan politik. Para politikus menganggap bahwa Rasul selain sebagai nabi juga sebagai negarawan.

Selain itu, Islam juga membawa ajaran yang komplit/menyeluruh (*kaffah*). Ajaran Islam tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah saja (*habl minallah*), tetapi juga pada hubungan sesama manusia (*habl minannaas*). Hubungan sesama manusia ini termanifestasikan dalam hubungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi, bagi umat muslim terdapat dua alasan penting yang mengharuskan ajaran Islam dilaksanakan secara *kaffah* yaitu Al-Quran dan Nabi Muhammad Saw.

Keadaan di atas menyebabkan sebagian kaum muslim meyakini bahwa untuk memperjuangkan kepentingan Islam harus dilakukan dengan jalur politik. Jalur politik menjadi hal yang wajib bagi mereka karena ajaran Islam menurut mereka juga mengajarkan hal tersebut. Politik di era peradaban modern manusia tidak bisa dilepaskan dari partai. Oleh sebab itu, jika kepentingan Islam harus diperjuangkan melalui jalur politik maka umat Islam harus mempunyai partai politik Islam. Menurut mereka hanya partai Islam lah yang benar-benar bisa menjamin terlaksananya agenda perjuangan umat muslim.

Di Indonesia partai Islam cukup banyak. Sejak dari Indonesia merdeka hingga saat ini partai-partai Islam hilang dan tumbuh silih berganti. Banyaknya partai Islam di Indonesia nampaknya disebabkan oleh kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Bahkan, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. *Ke-mayoritas-an* inilah yang nampaknya dimanfaatkan secara baik oleh para elit politik di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa dengan mayoritas muslim di Indonesia maka akan mudah meraih kekuasaan. Namun sejarah membuktikan bahwa partai Islam tidak pernah sekalipun memenangkan pemilu (pemilihan langsung umum) di Indonesia, baik

pada pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu terakhir tahun 2014. Paling tinggi partai Islam hanya berhasil menempati posisi kedua.

Pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin atau meraih kekuasaan. Pemilu muncul di era modern peradaban manusia. Peradaban modern menganggap pemilu merupakan upaya paling baik dalam memilih pemimpin. Anggapan paling baik itu menyebabkan bentuk pemilihan pemimpin selain melalui pemilu dianggap kurang atau tidak baik, seperti penunjukan langsung dan pewarisan kekuasaan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Berdasarkan pengertian ini jelas bahwa pemilu merupakan sarana, bukan tujuan. Dengan demikian dalam pelaksanaan pemilu semua pihak harus memanfaatkan sarana ini secara baik dan benar demi terwujudnya kedaulatan rakyat.

Sementara itu, Ramlan Surbakti selain memberikan pengertian pemilu berdasarkan kepada undang-undang yang ada di Indonesia juga mengartikan pemilu sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.⁴ Jadi, dalam pemilu rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada partai yang ia percayai dapat memperjuangkan kepentingannya. Dengan demikian, dalam pemilu diwajibkan adanya partai sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Pelaksanaan pemilu di era modern memiliki tujuan yang jelas. Menurut Huntington⁵ sedikitnya terdapat lima tujuan dilaksanakannya pemilu. Tujuan tersebut adalah:

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

⁴Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992, hal. 181

⁵Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 2001, hal. 18

1. Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Demokrasi menteorikan bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat. Namun demikian, tidak mungkin rakyat memerintah secara langsung. Diperlukan adanya wakil-wakil rakyat yang dapat memerintah secara langsung. Cara untuk menentukan atau memilih wakil-wakil rakyat tersebut adalah melalui pemilu sehingga dengan pemilu dapat dipilih para wakil rakyat yang akan memegang tampuk pemerintahan.
2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat menyampaikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.⁶
3. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung

⁶Meskipun pada realitanya tidak sedikit wakil rakyat yang terpilih pada pemilu di Indonesia setelah mendapatkan posisi sebagai “wakil rakyat” melupakan rakyat yang diwakilinya. Mereka melupakan bahwa mereka adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Jadi, pemilu yang berkualitas sebenarnya belum bisa menentukan berkualitas atau tidaknya wakil rakyat yang terpilih. Bisa saja pemilunya berkualitas, misal pelaksanaannya bebas dan rahasia. Tetapi, wakil rakyat yang diusung partai tidak menunjukkan dirinya sebagai wakil rakyat. Pada akhirnya partai dan pemilu hanya dijadikan sebagai sarana atau alat orang yang haus kekuasaan untuk meraih kekuasaan.

dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Apa yang telah dijelaskan oleh Huntington di atas menjadi bukti bahwa pemilu hanya merupakan sarana. Oleh karena itu, sebagai sarana ia dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman mewajibkan pemilu disesuaikan untuk kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, pemilu tidak boleh sama dari waktu ke waktu karena hal itu akan menyebabkan rakyat dirugikan. Bisa saja sistem pemilu pada tahun 1955 sudah tidak cocok lagi dengan pemilu pada tahun 2004, misalnya. Pemilu yang baik adalah pemilu yang terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Pemilu demokratis pertama di Indonesia

Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu yang demokratis di Indonesia karena melibatkan hampir seluruh rakyat yang terdaftar sebagai peserta pemilu. Rakyat Indonesia berbondong-bondong menuju ke bilik suara untuk menentukan siapa wakilnya yang akan duduk di Dewan Konstituante. Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil secara baik melaksanakan pemilu demokratis pertama di Indonesia ini.

Antusiasme besar rakyat Indonesia pada pemilu pertama tahun 1955 sangat dimanfaatkan oleh partai-partai Islam. Partai-partai Islam berjibaku merebut hati mayoritas pemilih yang notabene mayoritas muslim. Disebabkan banyaknya partai Islam pada saat itu maka sesama partai Islam harus bersaing merebut hati pemilih. Jadi, lawan partai Islam tidak hanya partai nasionalis tetapi

juga sesama partai Islam. Secara hitung-hitungan politik tentunya ini merugikan posisi partai Islam.

Ajaran Islam dan kekuasaan politik

Mayoritas umat muslim meyakini bahwa ajaran Islam mencakup seluruh kehidupan. Menurut Imam Al-Ghazali, agama dan politik merupakan satu kesatuan. Kedua entitas tersebut tidak bisa dipisahkan. Keterkaitan keduanya bisa digambarkan dengan agama sebagai dasar (asal tujuan) dan kekuasaan politik penjaganya. Segala sesuatu yang tidak memiliki asal (agama) akan hancur, dan yang tidak berpenjaga (kekuasaan politik) akan hilang.⁷Oleh karena itu, keduanya saling membutuhkan agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik dan sempurna.

Dalam ajaran Islam, kekuasaan merupakan suatu amanat. Dengan demikian, sebagai suatu amanat, kekuasaan wajib disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Namun, si penerima kekuasaan juga berkewajiban menjalankan kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Islam. Prinsip tersebut adalah menegakkan keadilan. Penegakan keadilan menjadi sangat penting dalam kekuasaan karena jika seorang penguasa bisa menjalankan kekuasaan dengan keadilan maka ia digolongkan sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 8 Allah Swt. Berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”⁸

⁷Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Etika Berkuasa: Nasehat-Nasehat Imam Al-Ghazali*, terj. Arief B. Iskandar, Bandung: Pustaka Hidayah, 1988, hal. 23

⁸Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, hal. 107

Partai-Partai Islam Pada Pemilu Pertama

Pada pelaksanaan pemilu pertama sejak Indonesia merdeka, partai Islam diwakili oleh PSII, Masjumi, NU, dan Perti. Sebenarnya masih ada partai Islam lainnya, namun keempat partai inilah yang dianggap benar-benar bisa mewakili suara umat muslim di Indonesia. Selain itu, keempat partai ini pula yang berhasil meraih suara dan mendudukkan wakilnya di parlemen (Dewan Konstituante).

a. PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia)

Partai pertama adalah PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia). Partai ini merupakan salah satu partai Islam tertua di Indonesia. Cikal bakal partai ini bermula dari organisasi Sarekat Islam (SI) yang didirikan oleh Haji Omar Said Tjokroaminoto. Pada kongres tahun 1923 yang diadakan di Madiun, SI akhirnya diubah menjadi partai politik, dengannya Partai Sarekat Islam (PSI). Partai itu bertekad untuk menentang pemerintah Belanda yang melindungi kapitalisme.⁹ Dengan demikian, pada saat membicarakan PSII tidak bisa terlepas dari sosok Tjokroaminoto.

PSI selanjutnya merubah namanya menjadi PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) pada tahun 1929. Sejarah panjang partai ini menyebabkan ia banyak terlibat dalam dunia perpolitikan bangsa Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Namun demikian, PSII tetap menjadi partai yang tidak bisa merebut mayoritas hati muslim Indonesia. Padahal, pada saat masih berupa organisasi Sarekat Islam, ia mampu merebut hati rakyat Indonesia. Bahkan, pemimpin SI yaitu H.O.S. Tjokroaminoto digelari Ratu Adil oleh rakyat karena perjuangannya dalam membela rakyat. Tidak hanya itu, pemerintah Hindia Belanda memberikan gelar *De Ongekroonde van Java* atau Raja Jawa Tanpa Mahkota.¹⁰ Gelar dari pemerintah Hindia Belanda itu dengan jelas menunjukkan pengaruh besar Tjokroaminoto dengan SI-nya terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan kaum muslim pada khususnya.

⁹Floriberta Aning, *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2005, hal. 78

¹⁰*Ibid.*, hal. 75

Namun demikian, pengaruh besar SI tersebut tidak berhasil dibawa ke dalam PSII. Pada saat memutuskan untuk berubah menjadi partai politik, PSII seolah-olah tidak memiliki pengaruh besar di mata rakyat. Selain itu, PSII disibukkan dengan perpecahan internal. Masing-masing tokoh di dalam PSII berusaha menanamkan pengaruhnya pasca Tjokroaminoto meninggal dunia pada 17 Desember 1934. Perpecahan tersebut tentunya berakibat pada lemahnya PSII.

Sebelumnya, PSII juga telah mengalami perpecahan, yaitu dengan berdirinya PII (Partai Islam Indonesia) pada tahun 1933. PII didirikan oleh Surjopranoto dan Sukiman Wirjosandjojo setelah keduanya dipecat dari PSII. Perpecahan selanjutnya terjadi pada saat munculnya Barisan Penyadar PSII yang diinisiasi oleh Agus Salim pada November 1936. Pada tahun 1937, Barisan Penyadar secara resmi memisahkan diri dari PSII.¹¹

b. Masjumi

Masjumi dibentuk dalam Muktamar Islam Indonesia di Gedung Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta, tanggal 7-8 November 1945. Dalam muktamar tersebut diputuskan bahwa Masjumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia, dan Masjumi lah yang akan memperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia. Dengan keputusan ini, keberadaan partai politik Islam yang lain tidak diakui.¹² Dengan adanya satu partai politik Islam diharapkan cita-cita Islam menjadi mudah untuk direalisasikan.¹³

Masyumi mewakili kepentingan-kepentingan politik umat Islam. Dalam Anggaran Dasar Masyumi ditegaskan bahwa "tujuan partai ialah terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang,

¹¹M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, Third Edition, PALGRAVE, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS, 2001, hal. 240

¹²Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 159

¹³Pada kenyataannya, satu partai ini sebenarnya tidak pernah terjadi. Selain Masjumi terdapat partai Islam lain, yaitu PSII dan Perti. Bahkan, beberapa tahun kemudian NU keluar dari Masjumi. Dengan demikian, konsep satu partai mengalami kegagalan total.

masyarakat, dan negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Illahi”.¹⁴ Dengan tegas disebutkan bahwa tujuan politik partai Masyumi adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia berdasarkan Islam.¹⁵

Partai ini dianggap sebagai partai yang terbesar di Republik Indonesia, walaupun sampai terselenggaranya pemilihan umum hal ini hanya dapat menjadi anggapan belaka, karena pada pemilihan umum 1955, Masjumi hanya berhasil meraih posisi kedua di bawah PNI. Partai ini tidak terorganisasikan secara teratur, dan mengalami perpecahan utama di dalamnya antara para pemimpin Islam tradisional dan modernis.¹⁶ Perpecahan yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah tidak terlepas dari persaingan “perebutan” posisi dalam partai dan pemerintahan. Dalam hal persaingan itu, NU lebih banyak mengalami “kekalahan” dalam persaingannya dengan kalangan modernis sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari Masjumi pada tahun 1952. Sebelumnya pada tahun 1947, PSII telah lebih dahulu keluar dari Masjumi.

c. NU (Nahdatul Ulama)

Sejak keluar dari Masjumi pada tahun 1952 maka NU berdiri sendiri sebagai partai politik. Wahid Hasyim menjadi Ketua partai NU sampai dia meninggal pada tahun 1953. Berdirinya NU sebagai partai politik Islam sendiri meninggalkan kenyataan pahit dalam perjuangan kepentingan Islam. Hal itu terbukti dengan adanya fakta bahwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur NU lebih mudah bekerja sama dengan PNI dan PKI dibandingkan dengan Masjumi. Padahal secara ideologi dan kepentingan perjuangan NU dan Masjumi lebih dekat dan sama, yaitu Islam.

PNI dan PKI merasa lebih nyaman berkolaborasi dengan partai Islam NU.¹⁷ Kolaborasi itu melepaskan PNI dan PKI dari bekerja sama dengan Masjumi. Pada akhirnya, kolaborasi ini melahirkan kekuatan baru, yaitu partai

¹⁴Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 113

¹⁵Ben Anderson, *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, terj. oleh Jiman Rumbo, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal. 253

¹⁶Ricklefs, *A History...*, hal. 293

¹⁷*Ibid.*, hal. 298

Jawa dan partai luar Jawa. Partai Jawa diwakili oleh PNI, NU, dan PKI sedangkan partai luar Jawa diwakili oleh Masjumi. Perpecahan ini menjadi penyebab sulitnya memperjuangkan agenda Islam karena partai Islam sendiri tidak bersatu.

d. Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)

Terdapat satu partai Islam yang tidak mau bergabung dengan Masjumi, yaitu Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Partai ini memiliki basis pendukung di Sumatera, terutama Sumatera Tengah. Partai ini secara ideologis berkaitan dengan Tarbiyah Islamiyah. Organisasi ini didirikan di suatu Pesantren di Candung, dekat Bukittinggi pada tanggal 20 Mei 1930.

Terbentuknya Tarbiyah Islamiyah sendiri merupakan respons atas kegiatan pembaruan di Minangkabau yang dilakukan oleh ulama modernis yang baru pulang dari Mekkah, seperti Haji Sumanik, Haji Piobang, dan Haji Miskin Pandai Sikek. Sama dengan NU yang terbentuk akibat dari kegiatan modernisasi di Jawa, namun NU mau bergabung dengan Masjumi yang didominasi oleh kalangan modernis. Hal ini bisa terjadi dikarenakan di Pulau Jawa telah ada upaya untuk menyatukan kalangan tradisionalis dan modernis, seperti dalam MIAI. Usaha-usaha penyatuan inilah yang memudahkan NU bergabung dengan Masjumi. Adapun di Sumatera belum ada usaha penyatuan seperti di Jawa, sehingga Perti, yang menganut paham tradisionalis, menolak bergabung dengan Masjumi, yang didominasi oleh kalangan modernis.¹⁸

Perti didirikan pada tanggal 22 November 1945. Selanjutnya, keputusan pendirian Perti diperkuat dengan Kongres yang dilaksanakan di Bukittinggi padatanggal 22-24 Desember 1945. Perti banyak terlibat dalam bidang pendidikan dan sosial semasa pendudukan Jepang. Apa yang diperjuangkan oleh Perti sejalan dengan perjuangan Tarbiyah Islamiyah. Perjuangan Tarbiyah Islamiyah adalah menyebarkan fiqh Syafi'i dan mazhab Ahlusunnah Waljamaah. Perjuangan inilah yang kemudian dibawa Perti dalam bidang pendidikan dan sosial. Dalam anggaran Dasar Partai tahun 1953 menekankan

¹⁸Mengenai perkembangan gerakan modernis di Indonesia lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1994.

kelanjutan hidup partai. Partai “tidak boleh dibubarkan”; partai “harus hidup dari abad ke abad sebagai Benteng pertahanan Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafii”.

Gagasan perjuangan Partai Islam

Persoalan mengenai klaim-klaim Islam atas politik Indonesia dihidupkan kembali oleh partai-partai politik Islam selama dan setelah kampanye Pemilihan Umum 1955. Dalam upaya memobilisasi dukungan Muslim di level akar rumput, partai-partai politik Islam menuntut pendirian “negara Islam” dan pemberlakuan Piagam Jakarta. Dalam perjuangan demi kekuasaan, politik identitas direproduksi dengan menghidupkan kembali kenangan kolektif tentang subordinasi pada masa lalu.¹⁹

Pandangan-pandangan mengenai unsur-unsur lain, misalnya mengenai konsep dan ideologi perjuangan umat Islam, yang menjadi bagian integral batang tubuh politik Islam, menjadi jelas dengan sendirinya. Sejalan dengan konsep tentang kekuasaan seperti disebutkan di atas, maka tujuan akhir konsep politik perjuangan umat Islam kelompok fundamentalis, tidak disangsikan lagi, adalah pembentukan negara Islam. Sementara itu, bagi kelompok reformis, tujuan akhirnya adalah kemenangan partai-partai Islam secara formal dalam pemilihan umum. Dengan itu, maka kesempatan untuk membangun sebuah masyarakat Islam—dan tidak serta-merta harus negara Islam—menjadi terbuka lebar.²⁰

Bagi elit partai Islam perjuangan kepentingan Islam hanya bisa diperjuangkan jika partai Islam berhasil memenangkan pemilu. Jika, partai Islam berhasil memenangkan pemilu, maka perjuangan kepentingan Islam di parlemen akan mudah dilakukan. Parlemen dijadikan medan perjuangan elit politik Islam yang menganggap perjuangan kepentingan Islam bisa dilakukan di negara yang tidak harus negara Islam. Dikarenakan kepentingan Islam hanya bisa dilakukan

¹⁹Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Edisi Digital, Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2012, hal. 453

²⁰Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Edisi Digital, Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011, hal. 48

melalui pemilu dan parlemen, maka secara eksklusif perjuangan Islam hanya bisa direalisasikan melalui partai-partai Islam.

Namun demikian, di parlemen perjuangan partai Islam tidak berjalan mulus. Partai-partai nasionalis dan sekuler berusaha menjegal perjuangan partai Islam. Akibat kekalahan dalam pemilu 1955, perjuangan partai Islam tidak bisa maksimal. Hasilnya perjuangan pembentukan negara Islam mengalami kegagalan.

Pertarungan Partai Islam Pada Pemilu Pertama

Sebelum pelaksanaan pemilu tahun 1955 dilakukan, tepatnya dua tahun sebelum pelaksanaan pemilu, pergolakan dan kekerasan politik mengalami peningkatan.²¹ Terjadi berbagai pergolakan di berbagai daerah, seperti di Medan, Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Pergolakan ini disebabkan oleh ketidakpuasan daerah terhadap elit politik di Jakarta.

Pada April 1955, dilaksanakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Sejenak perhatian rakyat Indonesia dan elit politik tertuju kepada pelaksanaan konferensi ini. Konferensi ini menjadi penting karena pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Kabinet Ali, berharap Indonesia dapat berperan besar dalam konferensi ini. Pemerintah berharap Indonesia menjadi pemimpin blok Asia-Afrika. Ide ini sendiri merupakan ide besar Presiden Soekarno. Sesuai dengan harapan tersebut, Indonesia berperan aktif selama pelaksanaan konferensi di Bandung. Di konferensi ini, Indonesia melahirkan ide-ide besar bagi kemajuan negara-negara di Asia-Afrika.

Setelah KAA selesai dilaksanakan, para elit politik mulai mengalihkan perhatiannya ke pemilu.²² Dua tahun menjelang pemilu tahun 1955 dilaksanakan, PKI (Partai Komunis Indonesia) mengalami pertumbuhan yang spektakuler. Antara bulan Maret dan November 1954 PKI mengklaim mengalami peningkatan anggota sebanyak tiga kali lipat dari 165.206 orang anggota menjadi 500.000

²¹Ricklefs, *A History...*, hal. 299

²²*Ibid.*, hal. 302

orang.²³ PKI memusatkan perekrutan anggotanya kepada petani miskin di daerah-daerah.

Usaha PKI tersebut mendapat perlawanan dari NU. NU sekuat tenaga berusaha membendung ekspansi pengaruh PKI. Sebagai pemilik basis perkampungan santri, NU tidak mau basis-basisnya direbut oleh PKI. Pertentangan antara NU dan PKI ini tidak jarang menimbulkan percikan-percikan konflik di daerah.

Pada September 1955 pemilu pertama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia berhasil dilaksanakan. Pada pemilu ini diperkirakan 39 juta rakyat Indonesia ikut memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di Dewan Konstituante. Jumlah 39 juta tersebut sama dengan 91,5% peserta yang terdaftar sebagai pemilih. Artinya dari 100% pemilih yang terdaftar hanya sekitar 8,5% saja yang tidak mencoblos, sisanya sebanyak 91,5% ikut mencoblos.²⁴ Melihat besarnya jumlah pemilih yang mencoblos pada hari pelaksanaan pemilu bisa dilihat bahwa rakyat Indonesia sangat antusias dalam mengikuti pemilu ini.

Antusiasime rakyat tersebut setidaknya disebabkan oleh dua hal. *Pertama* tingginya harapan rakyat Indonesia untuk berubah ke arah yang lebih baik. Rakyat Indonesia memiliki harapan dengan dilaksanakannya pemilu ini akan melahirkan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Melalui pemimpin-pemimpin (para wakil rakyat) yang terpilih rakyat Indonesia berharap nasib mereka bisa diperjuangkan.

Penyebab *kedua* adalah pemilu ini merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan oleh Indonesia sejak merdeka. Sebelum merdeka rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan dalam memilih. Jangankan kebebasan dalam memilih pemimpin, kebebasan hidup pun sangat terbatas. Kebebasan yang sebesar-besarnya pada pemilu pertama ini bisa diibaratkan surga bagi rakyat Indonesia untuk menunjukkan identitasnya.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, hal. 303

Hasil Pemilu Pertama Partai Islam kalah

Hasil pemilu tahun 1955 ini adalah sebagai berikut:²⁵

Partai	Suara Sah	Suara Sah %	Kursi Parlemen	Kursi Parlemen %
PNI	8 434 653	22.3	57	22.2
Masyumi	7 903 886	20.9	57	22.2
NU	6 955 141	18.4	45	17.5
PKI	6 176 914	16.4	39	15.2
PSII	1 091 160	2.9	8	3.1
Parkindo	1 003 325	2.6	8	3.1
Partai Katholik	770 740	2.0	6	2.3
PSI	753 191	2.0	5	1.9
Murba	199 588	0.5	2	0.8
Lainnya	4 496 701	12.0	30	11.7
Total	37 785 299	100.0	257	100.0

Ternyata, Pemilihan Umum 1955 tidak menghasilkan kemenangan bagi kelompok politik atau salah satu aliran besar manapun dalam masyarakat Indonesia. Aliran Islam hanya meraih 43,9% dari total suara atau 45,1% dari total kursi di DPR. Dari total 257 kursi di DPR, partai-partai Islam memperoleh 116 kursi. Masyumi, NU, PSII, Perti, dan partai-partai Islam lain memperoleh berturut-turut 57, 45, 8, 4, dan 2 kursi.²⁶

²⁵*Ibid.*, hal. 304

²⁶Latif, *Intelegensia Muslim...*, hal. 453

Pada pemilu ini dapat diketahui bahwa Masyumi menang di hampir semua daerah di luar pulau Jawa, kecuali Bali dan wilayah Kristen. Di Jawa Barat Masyumi juga berhasil memenangkan hati masyarakat Jawa Barat. Sementara itu, di Jawa Tengah dan Jawa Timur PNI, NU, dan PKI hampir memiliki kekuatan yang sama. Pada dua wilayah ini PNI menang sebesar 32%, NU 30%, dan PKI 27%. Sementara Masyumi hanya berhasil meraih suara sebesar 12%.

Jumlah total suara yang berhasil diraih partai Islam yang hanya 43,9% menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk muslim Indonesia mengarahkan pilihannya kepada partai nasionalis dan sekularis.²⁷ “Ketidaksesuaian” ini seharusnya menjadifakta yang jelas bahwa tidak seluruh kaum Muslim memiliki aspirasipolitik yang tunggal atau sama. Dengan demikian, memilikikeyakinan Islam tidak dapat dipahami secara otomatis sebagaiberkorelasi dengan atau dapat diterjemahkan sebagai dukunganuntuk partai-partai Islam atau kepentingan Islam.²⁸ Kekalahan partai Islam pada pemilu pertama di Indonesia menurut Bahtiar Effendi diakibatkan oleh perpecahan-perpecahan politis dan ideologis internal.²⁹

Pada 8 Maret 1956, karena PNI meraih persentase suara terbesar (22,3%), Presiden Sukarno menunjuk pemimpin PNI, AliSastroamidjojo sebagai formatur. Dalam Kabinet Ali II ini, semua partai Islam besar memiliki wakilnya dalam kabinet. Namun, kabinet ini gagal karena perseteruan ideologis danpersonal yang sengit di tubuh kabinet serta perselisihan di tubuh Angkatan Darat yang menyulut pemberontakan-pemberontakandaerah.³⁰

Implikasi kekalahan kepada perjuangan kepentingan Islam di Dewan Konstituante

Dalam Konstituante kelompok pendukung Pancasila memiliki 274 kursi yang terdiri dari tujuh fraksi besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai

²⁷Hal ini diasumsikan dengan fakta bahwa penduduk muslim pada tahun 1955 sekitar 90% lebih.

²⁸Effendy, *Islam dan Negara...*, hal. 424

²⁹*Ibid.*, hal.45. Kesimpulan Bahtiar Effendy ini berdasarkan analisisnya terhadap tulisan Allan Samson, R. William Liddle, B.J. Boland, Howard Federspiel, dan Muhammad Kamal Hassan.

³⁰Latif, *Intelegensia Muslim...*, hal. 454

Komunis Indonesia (PKI), Republik Proklamasi, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), serta empat belas fraksi kecil lainnya.³¹ Sementara kelompok pendukung Islam mempunyai 230 kursi yang terdiri dari empat fraksi besar yaitu Masjumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), serta empat fraksi kecil lainnya. Sedangkan kelompok pendukung Sosial-Ekonomi mempunyai 10 kursi yang terdiri dari tiga fraksi yaitu Partai Buruh, Partai Murba, dan Acoma.³²

Perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam Konstituante menunjukkan bahwa masing-masing kelompok, terutama kelompok pendukung Pancasila dan kelompok pendukung Islam, terkesan *ngotot* dalam mengajukan pendapat-pendapatnya. Argumen-argumen yang dikemukakan diharapkan dapat mengubah pendirian anggota-anggota kelompok yang menentang. Tetapi dikarenakan masing-masing pihak merasa argumen atau pendapatnya lah yang paling benar, unggul, dan sempurna, maka hasilnya justru kelompok yang menentang semakin menjauh dari kesepakatan.³³

Pada akhirnya dikarenakan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah, Konstituante yang ditugaskan merumuskan dasar negara tidak berhasil menyelesaikan tugasnya.³⁴ Dikarenakan kebuntuan di Konstituante tidak kunjung terpecahkan, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali secara resmi UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara. Sejak saat itu, Konstituante bubar.

³¹Erwien Kusuma dan Khairul, “Detik-detik Menjelang Bubarnya Konstituante” dalam Erwien Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante*, Jakarta: BAUR Publishing, 2008, hal. xii

³²*Ibid.*, hal. xiii

³³Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, penerjemah Sylvia Tiwon, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. xxxii

³⁴Jamilludin Ali, *Islam Kultural: Kajian Pemikiran Politik Nurcholish Madjid* (Tesis), Depok: Universitas Indonesia, 2010, hal. 88

Dengan dibubarkannya Dewan Konstituante, maka perjuangan partai Islam hasil pemilu pertama mengalami kegagalan. Bahkan pada masa selanjutnya, yaitu Demokrasi Terpimpin, peran dari partai-partai Islam mengalami penurunan. Lebih tragisnya, Partai Masjumi yang dianggap sebagai partai Islam terbesar harus membubarkan dirinya setelah dipaksa oleh Presiden Soekarno membubarkan diri.

Berdasarkan hal di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa partai Islam hanyalah sebuah nama. Islam hanya dijadikan penarik pemilih pemeluk agama Islam. Perjuangan kepentingan Islam yang dijargonkan oleh partai Islam didasarkan oleh kepentingan Islam menurut partai itu. Bukan didasarkan oleh kepentingan umat muslim. Jargon memperjuangkan Islam sebenarnya adalah memperjuangkan suatu agenda politik tertentu dengan menjadikan Islam sebagai kemasam dan senjata.³⁵ Hal inilah yang nampaknya menjadi salah satu penyebab tidak pernahnya partai Islam memenangi pemilu di Indonesia.

Partai Islam apa pun, tetap memiliki misi dan kepentingan sendiri, tidak identik dengan Islam itu sendiri. Partai politik kendati berlabel Islam atau dakwah bahkan sejatinya tetap partai politik, yang orientasi utamanya tetap pada perjuangan kekuasaan untuk dirinya sendiri, karena itu tidak harus dipersepsikan sebagai mewakili Islam dan umat Islam secara keseluruhan.³⁶

³⁵Abdurrahman Wahid (editor), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009, hal. 19

³⁶Haedar Nashir, *Kristalisasi Ideologi & Komitmen Bermuhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hal. 8-9

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad. *Etika Berkuasa: Nasehat-Nasehat Imam Al-Ghazali*. terj. Arief B. Iskandar. Bandung: Pustaka Hidayah. 1988
- Ali, Jamilludin. *Islam Kultural: Kajian Pemikiran Politik Nurcholish Madjid* (Tesis). Depok: Universitas Indonesia. 2010
- Anderson, Ben. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. terj. oleh Jiman Rumbo. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1988
- Aning, Floriberta. *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*. Yogyakarta: Penerbit Narasi. 2005
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang. 2003
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Edisi Digital. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi. 2011
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti. 2001
- Kusuma, Erwien dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante*. Jakarta: BAUR Publishing. 2008
- Latif, Yudi. *Intelegensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Intelegensi Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Edisi Digital. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi. 2012
- Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES. 1985
- Nashir, Haedar. *Kristalisasi Ideologi & Komitmen Bermuhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2007
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. penerjemah Sylvia Tiwon. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1995

- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES. 1994
- Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Third Edition, PALGRAVE, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS. 2001
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana. 1992
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
- Wahid, Abdurrahman (editor). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute. 2009